

**PERGESERAN PENGUASAAN EKONOMI KE PENGUASAAN POLITIK
(INDONESIA: THE RISE OF CAPITAL DALAM KONSEP POLITIK LOKAL)**

Oleh: Lusi Andriyani

Abstract

Many studies that appear along with the Robinson's work as well as that has been written in the 32-year Prisma 2013. The subject of the rise of capital that reconcile economic power and political power in the dynamics analysis gives space to contribute in the context in Indonesia. The rise of capital as a foundation to look at the implementation of the capitalist economy in Indonesia. era of reform in Indonesia has become an important point to explain the appearance of openness and a more open flow of affirmation of identity, one of them ethnic Chinese who have a role in the emergence of the rise of capital in Indonesia. No involvement of ethnic Chinese in politics and bureaucracy has encouraged Chinese people to move in the economic field. On the other hand, the new order of government policies that do not provide space for ethnic Chinese to enter the circle of government power at the time, more and encourage them to take part in the economic sphere and compete with indigenous entrepreneurs. Chinese people eventually build class in an economic context. They have also closely related to the pattern of the government at that time. Bureaucracy as an arm of government has built a strong network with Chinese businessmen. This is according to Kunio Yosihara as a form of ersatz capitalism that grows in Southeast Asia. Reform era for political openness and economic openness provides space for the emergence of new local elites were first associated with the patronage of the New Order. Regions such as the Pacific Islands are also not immune from the influence of the implementation of regional autonomy. This is evidenced by the election of Tjahaya Basuki Purnama (Ahok) as Regent of East Belitung in a few years ago.

The emergence Ahok or Tjahja Basuki Purnama important point in showing the role of ethnic Chinese in the reform era. Ahok success to become deputy governor of Jakarta accompany Jokowi prove that there is a great resource that encourages the representation of ethnic minorities considered the leader and gain political office in the local area. Economic and political strategies have made Ahok as local elites who are able to compete and play their part in making policy in the local area. On the other hand the ethnic Chinese in a much stronger position in the political realm. Ahok emergence in the political area as the local elite of ethnic Chinese society has given the real picture that ethnic minorities are seen as it is able to become the majority.

Keywords: political economy, local elite, Ahok

The Rise of Capital Sebagai Konsep Dalam Kajian Ekonomi Politik

Kajian tentang ekonomi politik semakin mendapat tempat seiring dengan munculnya buku karya Richard Robinson yang berjudul *Indonesia: The Rise of Capital* menjadi prestasi utama yang menempatkan kajian ekonomi politik di jantung kajian politik dan masyarakat Indonesia kontemporer¹. Konsep baru yang ditawarkan dalam buku tersebut adalah munculnya kembali *bourjuasi* Indonesia modern pada jaman Soeharto yang digambarkan melalui munculnya peran konglomerat yang dijalankan oleh etnis Tionghoa melalui kerjasama yang dinamis dengan birokrasi. Kerjasama antara *bourjuasi* dan birokrasi dilihat telah memiliki sisi positif untuk membangun kepemilikan kapital dalam lingkaran pengusaha etnis Tionghoa.

Banyak kajian yang muncul seiring dengan karya Robinson tersebut seperti halnya yang telah dituliskan dalam Prisma edisi 32 tahun 2013, yang mengambil tema "Perselingkuhan Bisnis dan Politik: Kapitalisme Indonesia Pasca Otoritarianisme". Majalah tersebut membahas tentang pengaruh pandangan Richard Robinson tentang *Indonesia: The Rise of Capital* dalam berbagai sub tema. Pokok bahasan *the rise of capital* yang menyandingkan kekuatan ekonomi dan kekuatan politik dalam satu dinamika analisis memberikan ruang untuk memberikan kontribusi dengan menyandingkannya dalam konteks peristiwa yang terjadi di Indonesia. Penggambaran pola pemerintahan, peran pengusaha, peran birokrasi, dominasi etnis Tionghoa dalam penguasaan ekonomi, serta bagaimana mereka menguasai kapital memberikan dorongan terhadap munculnya kajian-kajian lain yang dikaitkan dari terbangunnya penguasaan kapital tersebut. Permasalahan HAM, pertarungan modal, kehidupan oligarki, dominasi elit lokal, korupsi, pasar dan kapitalisme menjadi topik yang muncul seiring dengan konsep *the rise of capital* yang digagas oleh Richard Robinson.

The rise of capital juga dapat diletakkan sebagai landasan untuk melihat pelaksanaan ekonomi kapitalis di Indonesia. Karya Robinson ini menjadi semakin menarik pada era reformasi dimana kekuatan ekonomi muncul sebagai pendorong kekuatan politik. Tidak dapat dipungkiri bahwa berkembangnya pandangan Robinson tentang *The rise of capital* seiring dengan berkembangnya demokrasi di negara-negara maju yang bergerak ke arah negara berkembang atau dunia ketiga. Penggambaran pergerakan demokrasi tersebut dituliskan oleh Huntington dalam bukunya "*The Third wave democratization*" yang memberikan uraian tentang gelombang demokratisasi ke arah negara berkembang.

Munculnya era reformasi di Indonesia menjadi point penting untuk menjelaskan munculnya keterbukaan dan semakin terbukanya arus penegasan atas identitas tertentu, salah satunya etnis Tionghoa yang mempunyai peran dalam munculnya *the rise of capital* di Indonesia. Tidak

¹ Vedi R. Hadiz, *The Rise of Capital* dalam keniscayaan ekonomi politik, Prisma, Volume 32 tahun 2013.

berperannya etnis
bergerak di bidan
memberikan ruang
saat itu, semakin
pengusaha prib
ekonomi. Penguas
saat itu. Birok
dengan penguas
semu yang tunc

Kapital

adanya campur
bebas dan mer
dikalangan
industrialisasi
hanya sebagai
sendiri. Pansa
sebagai camp
kapitalisme
campur tang
yang kaitan
dibandingkan

Otoritama

Dire

rezim an

posisi. In

menit

Sosial

disemb

men

"Lan

"Lan

"Lan

"Lan

Ka

berperannya etnis Tionghoa dalam politik dan birokrasi telah mendorong etnis Tionghoa untuk bergerak di bidang ekonomi. Disisi lain, kebijakan pemerintahan orde baru yang tidak memberikan ruang bagi etnis Tionghoa untuk masuk dalam lingkaran kekuasaan pemerintah pada saat itu, semakin mendorong mereka untuk berkiprah di ranah ekonomi dan bersaing dengan pengusaha pribumi. Etnis Tionghoa akhirnya membangun kelas tersendiri dalam konteks ekonomi. Penguasaan capital yang mereka miliki juga berkaitan erat dengan pola pemerintahan pada saat itu. Birokrasi sebagai kepanjangan tangan pemerintah telah membangun jejaring yang kuat dengan pengusaha Tionghoa. Hal inilah yang menurut Yosihara Kunio sebagai bentuk kapitalisme semu yang tumbuh di Asia Tenggara.

Kapitalisme *Ezart* (semu) menurut Yosihara Kunio disebabkan oleh dua faktor: *pertama*, adanya campur tangan pemerintah yang terlalu banyak sehingga mengganggu prinsip persaingan bebas dan membuat kapitalisme menjadi tidak dinamis dan memunculkan para pencari rente dikalangan birokrat. *Kedua*, tidak didasarkan pada teknologi yang memadai, sehingga tidak terjadi industrialisasi yang mandiri². Dalam konteks ini kapitalisme yang berkembang di Asia Tenggara hanya sebagai komparador yang bertindak sebagai agen industri manufaktur asing dinegerinya sendiri. Pandangan tersebut mendorong Yosihara Kunio untuk memberikan jawaban alternative sebagai cara untuk memperbaiki ke dinamisan kapitalisme yang terjadi di Asia Tenggara kearah kapitalisme tulen. Alternative jawaban tersebut antara lain bahwa; harus memperbaiki kualitas campur tangan dibidang ekonomi, serta meningkatkan kemampuan teknologi. Berkaitan dengan cara yang kedua, pengembangan keilmuan seyogyanya memprioritaskan pada bidang teknologi dibandingkan dengan humaniora dan ilmu sosial³.

Otoritarian, Demokrasi dan Politik Lokal

Di beberapa negara di Asia tenggara, perkembangan kapitalisme ada dibawah kekuasaan rezim otoritarian. Dalam kondisi tersebut, kaum pengusaha dan kapitalis masih dalam penguatan posisi. Dengan kata lain periode tersebut merupakan proses industrialisasi terlambat yang membutuhkan perlindungan dan subsidi dari negara di bidang ekonomi⁴. Di Indonesia rezim Soeharto dilihat dalam konteks hubungan antara birokrasi dan koalisi dengan pengusaha yang disebut sebagai kapitalis. Upaya untuk membangun negara Indonesia juga dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan Bank dunia serta investor asing. Kerjasama yang kuat antara teknokrat,

²Kunio, Yoshiharo, *Kapitalisme Semu Asia Tenggara*, LP3ES, Jakarta, 1990, hal.xiv

³ibid, hal. xv

⁴Vedi R Hadiz, *Dinamika Kekuasaan Ekonomi Politik Indonesia Pasca Soeharto*, LP3S, Jakarta, tahun 2005, hal. 105

birokrat dan pengusaha telah mendorong stabilitas ekonomi dibandingkan dengan stabilitas politik. Kekuasaan negara pada tahap ini berkembang menjadi instrument penting bagi oligarki kapitalis⁵. Oligarki yang muncul untuk menggerakkan kepentingan bisnis, politik dan birokrasi yang dijalankan oleh keluarga-keluarga terkemuka dalam bisnis, seperti Soeharto, Salim, Bakrie serta Kartasasmita. Keberhasilan yang mereka dapatkan tidak lain dengan penggunaan kekuasaan negara untuk menjalankan apa yang diinginkan melalui jaringan patronase. Dengan demikian ada tiga hal yang dapat menggambarkan pola para kapitalis di era Orde Baru, antara lain⁶: **Pertama**, oligarki kapitalis ayang mampu memanfaatkan kekuasaan negara untuk memperluas kepentingannya. **Kedua**, sistem hubungan negara dan masyarakat yang lebih didominasi oleh lembaga korporatis yang dibentuk oleh negara. **Ketiga**, terbangunnya sistem patronase yang luas dan kompleks dengan cendana sebagai porosnya.

Borjuasi yang ada di negara dunia ketiga seperti di Indonesia yang lebih dikenal dengan pengusaha lebih memilih untuk bekerjasama dengan perusahaan multinasional untuk dapat memperoleh kesempatan berada di tengah-tengah mereka. Tindakan yang dilakukan adalah melakukan eksport bahan mentah yang tidak dimiliki oleh negara-negara maju. Borjuasi di negara dunia ketiga memilih jalan untuk menjadi mitra dagang yang inferior dengan para pengusaha multinasional (raksasa) dengan menempatkan dirinya sebagai kapitalis komprador. Pilihan untuk menjadi ekportir bahan mentah dibandingkan berusaha bersaing dibidang industri menjadikan mereka menjadi inferior. Tidak berkembangnya kapitalis tulen, juga didukung dengan kondisi sosial politik di negara-negara dunia ketiga yang masih diwarnai dengan konflik masyarakat yang terjadi karena adanya polarisasi, sehingga mendorong terbangunnya pola pemerintahan yang otoriter. Tumbuhnya borjuasi dinegara dunia ketiga sebagai kelas menengah diharapkan mampu membawa pada perubahan politik yang demokratis. Namun dalam kenyataannya tidak dapat diwujudkan dengan baik, dimana pemerintah masih ikut campur dalam mendukung kepentingan borjuasi.

Borjuasi merupakan bagian dari perkembangan kapitalisme. Pemahaman tentang borjuasi yang dikemukakan oleh Tosihara Kunio menempatkan persaingan bebas dengan pemilikan alat produksi dan barang yang dihasilkan untuk meraih keuntungan. Hal tersebut berbeda dengan pandangan Wallerstein yang menempatkan usaha yang sedikit dalam mencari keuntungan sebagai pendorong munculnya borjuasi "rente" yang terjadi di dunia ketiga. Begitu juga dengan borjuasi

⁵ Ibid, hal.259

⁶ Ibid, hal 259-260

administrative yang muncul karena adanya birokrat pemerintah yang mencari kekayaan dengan menyewakan kekuasaan birokrasinya⁷.

Era reformasi yang terjadi pada awal 1998 memberikan dampak positif bagi keterbukaan di masyarakat Indonesia. tidak hanya dalam bidang sosial, ekonomi namun juga politik. Politik yang tertutup dan penuh dengan intimidasi pada zaman orde baru telah berubah kearah politik yang terbuka, dengan partisipasi aktif dari masyarakatnya. Era reformasi memperlihatkan adanya perubahan yang menyeluruh, termasuk didalamnya tatanan social yang dibangun selama orde baru. Perkembangan politik tersebut disebabkan karena tidak adanya wadah organisasi berbasis akar rumput yang dapat mewakili kelompok-kelompok social yang lebih besar seperti kaum buruh dan petani sebagai pihak yang terpinggirkan selama masa Orde baru⁸. Munculnya elit baru, kaum intelektual, para politisi, pengusaha dan tokoh lokal yang sebegini besar dari jaringan patronase orde baru untuk mendapatkan kekuasaan melalui partai politik .

Transisi demokrasi yang dialami di Indonesia telah memberikan ruang penegasan kembali identitas dan partisipasi masyarakat. berbagai ragam ide muncul beringan dengan munculnya elit baru dalam politik Indonesia. kaum muda sebagai penggerak reformasi memberikan beragam tawaran untuk diajukan sebagai model perbaikan demokrasi kedepan. Pada masa tersebut terbangun pola-pola baru dan dinamika-dinamika penting didalam penggunaan kekuasaan social, ekonomi dan politik yang sedikit banyak telah mendapat bentuk⁹. Salah satu pola yang kemudian dimunculkan di era reformasi adalah otonomi daerah sebagai bentuk pelaksanaan politik lokal. Reformasi telah membangun prespektif baru dalam mengakomodasi kepentingan lokal melalui otonomi daerah atau desentralisasi.

Disisi lain desentralisasi juga memunculkan kontraversi yang berkaitan dengan cakupan otonomi lokal sebagai isu yang dikembangkan untuk mengeliminir persaingan elit lokal dalam meraih kekuasaan untuk memperebutkan sumberdaya material yang kongkret¹⁰. Dalam konteks otonomi daerah ada upaya untuk menyeimbangkan kekuasaan yang dilimpahkan dengan upaya untuk menguasai dan mengendalikan kekayaan material yang dimiliki oleh daerah serta mengakomodir aspirasi masyarakat bawah untuk mendapatkan otonomi yang luas dalam pengelolaan daerah. Disisi lain elit-elit lokal ingin mendapatkan kendali langsung atas potensi yang

⁷Kunio, Yoshiharo, *Kapitalisme Semu Asia Tenggara*, LP3ES, Jakarta, 1990, hal.xxiv

⁸Vedi R Hadiz, *Dinamika Kekuasaan Ekonomi Politik Indonesia Pasca Soeharto*, LP3S, Jakarta, tahun 2005, hal. 209.

⁹Ibid, Vedi R hadiz, hal.238

¹⁰Ibid, Vedi R hadisz, hal. 241

sama untuk kepentingan dirinya sendiri¹¹. Ciri lembaga baru yang muncul pada era reformasi dapat dijelaskan pada table dibawah ini :

Table. 1
Pergeseran Ciri Lembaga Pada Era Orde Baru ke Era Reformasi

No	Kerangka Lembaga Lama	Kerangka Lembaga Baru
1	Kekuasaan ada dilembaga kepresidenan	Kekuasaan pada partai-partai dan lembaga
2	Partai politik sebagai alat pemerintah	Kebangkitan partai politik sebagai ekspresi dari pergeseran koalisi-koalisi kekuasaan, kepentingan predatoris lama masih ada di dalam tubuh partai politik
3	Kekuasaan sentralistik	Kekuasaan dari sentralistik ke daerah, sehingga pejabat daerah mempunyai arti penting baru
4	Patronasi terpusat	Memunculkan patronase yang desentralistik, tumpang tindih dan tersebar untuk memperebutkan akses control terhadap sumberdaya negara baik di tingkat nasional maupun lokal
5	Kedudukan pialang ada dibawah dalam patronase politik	Bandar, pialang dan criminal politik muncul dilapisan atas
6	Ormas Islam tidak muncul aktif untuk bergerak	Kebangkitan kekuatan-kekuatan militer seperti lascar islam yang mengambil fungsi militer
7	Control terlalu otoritarian	Penggunaan politik uang dan politik kekerasan serta intimidasi baik di tingkat nasional maupun lokal
8	Pemilu	Pemilu mempunyai peran penting terutama pada pemilu lokal
9	Peran militer sangat kuat	Peran militer menjaga pertahanan dan keamanan

¹¹ibid, hal. 241

	negara
--	--------

Sumber : Adaptasi dari Vedi R Hadiz, *Dinamika Kekuasaan Ekonomi Politik Indonesia Pasca Soeharto*, LP3S, Jakarta, tahun 2005, hal. 262-263.

Ahok dan Munculnya Elit Lokal Baru

Reformasi memberikan angin segar bagi keterbukaan politik dan keterbukaan ekonomi. Demokrasi dalam kajian politik telah menuntut persamaan dan menggariskan setiap orang untuk menyuarakan aspirasinya. Sedangkan demokrasi ekonomi menuntut suatu mekanisme pengaturan ketidaksamaan ekonomi menjadi suatu keselarasan sosial¹². Salah satu hal yang menjadi perhatian di era reformasi adalah posisi etnis Tionghoa di bidang ekonomi dan juga politik. Dengan menonjolkan multikulturalisme, era reformasi memberi ruang pada etnis-etnis untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Di era reformasi masyarakat Tionghoa lebih membaur dan terintegrasi di dalam keberbedaan masyarakat. Kemajemukan Kebudayaan Tionghoa tercermin dalam era sekarang ini.

Kondisi yang dialami Indonesia dengan pergeseran rezim Orde Baru ke Orde Reformasi memberikan ruang bagi munculnya elit-elit lokal baru yang dulu berkaitan dengan patronase Orde Baru. Khususnya keterkaitan dengan keluarga Cendana yang memiliki jaringan bisnis menggurita di tanah air. Hubungan pengusaha, birokrasi dan politisi pada jaman Orde Baru telah memunculkan elit-elit baru yang membangun dirinya atas dasar kepentingan pribadi atau perseorangan. Mereka terbangun dalam kelompok bisnis baru yang mempunyai ambisi tinggi, mengingat pada masa orde baru kelompok ini dimanfaatkan untuk melaksanakan kerja lapangan dalam menjalankan program pembangunan yang di rancang. Ketergantungan yang kuat terhadap program dan proyek negara atau pemerintah merupakan ciri khusus yang muncul pada pengusaha dan birokrasi pemerintah. Sehingga yang muncul sebagai elit baru, aktor politik baru di sini adalah para pengusaha kecil atau tingkat menengah yang tergantung pada kontrak dan proyek negara, politisi, profesional serta partai-partai orde baru atau aktivis yang terkait dengan organisasi seperti HMI, KNPI, GMNI, GMKI yang melalui organisasi ini Orde Baru merekrut kader-kader politik baru¹³.

Daerah seperti Bangka Belitung juga tidak luput dari pengaruh pelaksanaan otonomi daerah. Bangka Belitung merupakan penghasil timah yang diekspor. Pada tahun 2011 setiap bulannya nilai ekspor timah rata-rata 2 Triliun rupiah. Namun tidak seluruh uang itu berputar di Bangka Belitung, sebagian diinvestasikan pemilik modal ke daerah asalnya diluar Bangka Belitung

¹² Leo Suryadinata, *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa 1900-2002*, LP3ES, Jakarta, Tahun 2005, hal.350.

¹³ Vedi R Hadiz, *Dinamika Kekuasaan Ekonomi Politik Indonesia Pasca Soeharto*, LP3S, Jakarta, tahun 2005, hal. 245.

baik didalam maupun diluar negeri¹⁴. Di Bangka Belitung sendiri hasil kecil dari tambang timah berputar diwilayah tersebut yang mampu memicu percepatan ekonomi masyarakat belum dapat menikmati hasil sumberdaya alam yang mereka miliki.Hanya pemilik capital yang besar yang menikmati hasil timah tersebut.

Berdasarkan data dari BPS Bangka Belitung mempunyai komposisi penduduk yang berdasarkan etnisitasnya terbesar adalah Melayu Bangka dan Melayu Belitung 69%, Tionghoa 11%, Jawa 6%, Bugis Makasar 3%,Madura dan sejumlah suku lain. kehidupan masyarakat di Bangka Belitung tidak pernah mempertentangkan kesukuan, mayoritas maupun minoritas. Kebersamaan menjadi semangat hidup yang dibangun dengan semboyan “serumpun sebalai” menegaskan bahwa persatuan adalah harga mati bagi masyarakat di Bangka Belitung.Sejak abad 17 warga Tionghoa sudah berdatangan di Bangka Belitung utuk bekerja di pertambangan timah.Kedatangan Tionghoa di sector pertambangan telah mendorong terbangunnya masyarakat Tionghoa peranakan yang dihasilkan dari perkawinan antara etnis Tionghoa dengan masyarakat melayu.Kalau mereka memeluk Islam, maka dia melebur dalam masyarakat melayu. Dan sebaliknya apabila mereka mempertahankan identitas Tionghoa, maka mereka akan menjadi seorang peranakan¹⁵.

Tidak hanya dalam pernikahan yang telah mempererat hubungan antara etnis Melayu dan etnis Tionghoa, kebiasaan dengan mengangkat anak atau “anak piara” menjadi hal yang biasa.Keluarga Melayu mengangkat anak seorang Tionghoa dan sebaliknya¹⁶.Kedekatan hubungan antara etnis Tionghoa dan etnis Melayu tidak hanya terbangun dengan cara emosional melalui pernikahan dan pengangkatan anak, namun juga rasional.Dimana masyarakat bersatu tanpa ada prasangka antar kelompok masyarakat yang berbeda etnis, khususnya Tionghoa dan Melayu sebagai etnis terbesar di Bangka Belitung.

Hal tersebut dibuktikan dengan terpilihnya Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) sebagai Bupati Belitung Timur pada beberapa tahun yang lalu.Ahok terpilih menjadi Bupati Belitung timur yang 90% masyarakatnya adalah Melayu.Pertimbangan yang digunakan pemilih untuk memilih Ahok lebih dilihat dalam konteks rasionalitas dan pengakuan terhadap kedekatan hubungan lintas komunal¹⁷.Kedekatan emosional telah terjalin jauh sebelum euphoria otonomi daerah dan pemekaran daerah digulirkan.

¹⁴ Arip Ripangi, Sisi lain Ahok: Perjalanan hidup, karor dan keluarga, Glosaria Media, Jakarta, 2013, hal. 4.

¹⁵Ibid, Arip Ripangi, hal. 5

¹⁶Ibid, Arip Ripangi, hal. 5

¹⁷ Arip Ripangi, Sisi lain Ahok: Perjalanan hidup, karor dan keluarga, Glosaria Media, Jakarta, 2013, hal. 5

Munculnya Ahok atau Basuki Tjahja Purnama menjadi point penting dalam menunjukkan peran etnis Tionghoa di era reformasi. Kemenangannya dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta telah memunculkan pandangan baru tentang peran etnis Tionghoa yang selama ini di pahami oleh khalayak umum lebih cenderung pada bidang ekonomi. Keberhasilan Ahok untuk menjadi wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Jokowi membuktikan bahwa ada sumberdaya besar yang mendorong keterwakilan etnis yang dipandang minoritas menjadi pemimpin dan memperoleh jabatan politis di wilayah lokal. Motivasi dan semangat yang mendorong Ahok untuk tampil dalam jabatan politik patut mendapat perhatian. Tidak hanya mereposisi peran etnis dalam bidang ekonomi, namun juga menempatkan etnis Tionghoa dalam bidang politik secara permanen. Ruang yang menjadikan etnis Tionghoa lebih mendapat tempat di hati masyarakat Indonesia. Keberbedaan dan diskriminasi yang terjadi di era sebelumnya pelan-pelan telah terkikis seiring dengan pembuktian Ahok pada saat terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Ahok lahir dari keluarga pengusaha yang cukup dikenal di wilayah pulau Belitung. Kepedulian yang diberikan oleh keluarga dari Ahok terhadap sesama telah menempatkan keluarga Ahok sebagai etnis Tionghoa yang mempunyai arti penting di hati masyarakat. Perjalanan hidupnya di daerah telah memberi peajaran besar untuk selalu membangun diri lebih berkualitas. Upaya tersebut ditunjukkan dengan kepindahannya ke Jakarta dalam rangka menuntut ilmu. Keinginan tersebut akhirnya tercapai dengan perjuangan yang sangat keras dalam menggapai keinginan dan cita-cita untuk menjadi seorang insinyur. Pendidikan ditempuh sebagai alat untuk memperbaiki kualitas hidup yang telah dijalani oleh keluarganya. Keinginan untuk maju, bekerja keras dan ulet telah ditunjukkan dengan hasil yang memuaskan dengan menyandang sarjana teknik geologi dari Universitas Tri Sakti Jakarta. Keberhasilan yang diperoleh tidak melupakan Ahok dengan kampung halaman.

Tahun 1991 adalah awal kehidupan Ahok dalam mengenal dunia bisnis dengan menggantikan posisi ayahnya untuk mengatur usaha tambang timah. Dengan gelar kesarjanaan yang diperolehnya Ahok mendirikan perusahaan dengan nama CV Panda yang bergerak dibidang kontraktor pertambangan PT Timah. Inilah awal mula kepemilikan capital Ahok. Patron kline dan asas kekeluargaan telah mengenalkan Ahok pada dunia bisnis dan kepemilikan sebuah usaha. Usaha tersebut dijalankan selama dua tahun. Namun permasalahan modal serta keinginan yang kuat untuk membangun masyarakat di daerahnya telah mengantarkan Ahok untuk mengikuti pendidikan S2 di bidang manajemen keuangan. Dan gelar tersebut telah membawanya untuk menjadi stafdireksi bidang analis biaya dan keuangan proyek yang bergerak di bidang kontraktor pembangunan pembangkit listrik.

Tahun 1992 Ahok telah mendirikan PT Nurindra Ekapersada sebagai persiapan untuk membangun pabrik *Gravel Pack Sand* (GPS) yang didirikan pada tahun 1995¹⁸. Pabrik yang didirikan di Kecamatan Manggar Belitung Timur tersebut diharapkan mampu menjadi proyek percontohan bagaimana mensejahterakan pemegang saham, karyawan dan rakyat. Dengan mendirikan PT tersebut diharapkan mampu berkontribusi pada Pendapatan Asli Belitung Timur dengan memberdayakan sumberdaya mineral yang terbatas. Usaha tersebut juga disorong dengan visi untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang tangguh¹⁹. Ahok juga mendirikan pabrik pengolahan pasir kwarsa di Belitung Timur dengan memanfaatkan teknologi Amerika. Pabrik ini diharapkan mampu menjadi cikal bakal kawasan industri dan pelabuhan dengan nama KIAK (Kawasan Industri Air kelik) di Belitung Timur²⁰.

Tahun 2004, usaha Ahok berkembang dengan kedatangan investor dari Korea yang membangun smelter (peleburan biji timah) telah menaikkan harga biji timah tambang rakyat di pasaran Belitung. Kondisi ini telah mendorong peningkatan ekonomi rakyat di daerah Belitung. Ahok juga menawarkan konsep area pabrik dengan penyediaan fasilitas pergudangan dan pelabuhan yang bertaraf internasional membuat investor Korea semakin tertarik untuk berinvestasi di Belitung. Berkembangnya perusahaan yang di tangani oleh Ahok mengantarkan dirinya untuk menjadi elit lokal baru dengan kepemilikan capital yang kuat. Munculnya Ahok sebagai pemilik capital di tingkat lokal memberikan pengaruh besar pada perannya terhadap masyarakat sekitar. Pengalaman yang tidak menyenangkan dalam menghadapi politik dan birokrasi yang korup telah menyebabkan pabrik yang dimiliki di tutup. Hal ini diakibatkan sikapnya menentang kesewang-wenangan dari pejabat yang berwenang.

Ahok: Dari Penguasaan Ekonomi Ke Penguasaan Politik

Dorongan untuk membantu rakyat yang ada disekitarnya membuat Ahok membuka pikiran, bahwa dengan hanya berusaha sebagai pengusaha tidak akan mampu mengubah kehidupan rakyat yang ada disekitarnya. Menurutnya salah satu cara adalah dengan menjadi pejabat negara²¹. Maka pada tahun 2003 Basuki Thahaja Purnama terjun di dunia politik bergabung dengan Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB). Pergeseran penguasaan ekonomi atau capital ke arah penguasaan politik mulai dibangun oleh Ahok. Dengan menjabat sebagai ketua dewan pimpinan

¹⁸ Arip Ripangi, Sisi lain Ahok: Perjalanan hidup, karor dan keluarga, Glosaria Media, Jakarta, 2013, hal. 19

¹⁹ Ibid, Arip Ripangi, hal. 19

²⁰ Ibid, Arip Ripangi, hal. 20

²¹ Ibid, Arip Ripangi, Sisi lain Ahok: Perjalanan hidup, karor dan keluarga, Glosaria Media, Jakarta, 2013, hal. 21

cabang partai PIB kabupaten Belitung timur Ahok mengawali karirnya di bidang politik. Demokrasi yang memberikan ruang bagi terbentuknya partai politik baru memberi kesempatan yang luas bagi partai tersebut untuk mendapatkan suara. Keinginan untuk berubah dari masyarakat, telah membawa kemenangan bagi partai politik yang baru ikut dalam kompetisi di pemilihan umum. Ruang inilah yang menjadikan akses bagi Ahok untuk dapat memposisikan diri dalam kekuasaan politik.

Pada pemilu tahun 2004, Ahok mencalonkan dirinya sebagai legislative dan berhasil terpilih menjadi anggota DPRD Belitung Timur pada periode 2004-2009 dengan menduduki posisi di bidang anggaran. Dalam menjalankan kekuasaan sebagai wakil rakyat di DPRD Belitung timur, Ahok berupaya menyerap aspirasi rakyat yang ada di bawah. Upaya yang dilakukan oleh Ahok sebagai strategi untuk menjalankan tugasnya yaitu menyediakan fasilitas yang dapat dijadikan tempat hiburan bagi rakyat kecil seperti dengan membuat lapangan sepak bola mini, lapangan bola volley, kolam ikan serta memberikan bantuan secara material berupa uang. Strategi tersebut secara tidak langsung merupakan alat bagi Ahok untuk melanggengkan kekuasaannya. Pendekatan secara kapitalistik dan materialistik menjadi andalan bagi Ahok untuk dapat meraih simpati rakyat. Kemampuan secara finansial menjadikan Ahok mempunyai sumberdaya untuk dapat meraih kekuasaan melalui simpati rakyat.

Dalam menjalani karir politiknya Ahok terkenal bersih dan vocal menyuarakan kepentingan rakyat. Motivasi Ahok untuk menyejahterakan rakyat semakin tinggi, Hal ini sebagai dasar bagi Ahok untuk selalu bergerak meniti karir di bidang politik. Karir politik ini ditunjukkan dengan keinginannya untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Belitung Timur dalam pemilihan kepala daerah langsung pada tahun 2005. Demokrasi dan politik lokal memberi ruang yang sangat besar bagi Ahok untuk berkiprah di politik. Berbeda dengan kondisi era Orde Baru yang menempatkan Tionghoa di area ekonomi dan tidak memberi kesempatan untuk ikut bertarung dalam memperebutkan kekuasaan politik. Ahok mencalonkan diri sebagai Bupati Belitung Timur berpasangan dengan Khairul Effendi dari Partai Nasional Banteng kemerdekaan (PNBK). Partai baru menjadi alat bagi Ahok dan pasangannya untuk memberi nuansa baru bagi demokrasi di Indonesia. Pola pikir masyarakat yang berubah untuk dapat lebih terbuka, dan menerima inovasi baru dengan harapan perubahan bagi kehidupannya seiring dengan bergulirnya reformasi memberi peluang besar untuk sukses. Hal tersebut ditunjukkan dengan keberhasilan pasangan Ahok dan Khairul Effendi dengan perolehan suara 37,14 % yang menempatkan pasangan tersebut sebagai Bupati dan wakil bupati terpilih pertama di Belitung timur. Kondisi tersebut menarik pada saat

perolehan suara yang diperolehnya justru berasal dari lumbung suara Partai Bulan Bintang (PBB) pada pemilihan umum tahun 2004²².

Pasangan Bupati Belitung Timur yang baru tersebut mempunyai visi misi kerja yang akan dijalankan selama lima tahun jabatannya. Visi dan misi tersebut dijadikan dasar dalam menjalankan program untuk mengisi pembangunan dan menyejahterakan rakyat. Adapun visi dan misinya antara lain :

- (1) menjadikan pemerintah daerah yang professional, jujur dan berwibawa dimata rakyat,
- (2) memberikan jaminan kesehatan dan pendidikan bagi seluruh rakyat, (3) menciptakan wiraswasta-wiraswasta skala kecil dan menengah, (4) menjadikan kabupaten Belitung Timur sebagai kawasan industry, pariwisata dan kelautan perikanan secara terpadu, (5) mengelola sumberdaya alam dengan konsep jangka panjang dan berwawasan lingkungan.²³

Dari visi misi yang dicanangkan, Ahok dianggap berhasil dalam menjalankan programnya, antara lain berubahnya paradig di lingkungan pemerintah daerah khususnya PNS untuk lebih disiplin dalam bekerja. Selain itu program asuransi kesehatan bagi masyarakat Belitung timur yang ber KTP serta memberi bantuan bagi sekolah, memberikan bantuan uang untuk penduduk yang meninggal, mendatangkan investor untuk pengembangan perkebunan sawit, memberi bantuan bagi usaha kecil dan menengah untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir serta memanfaatkan Kawasan Industri Air Kelik sebagai pusat kawasan industri hilir minyak sawit (CPO), penyimpanan distribusi minyak sawit (CPO) serta seluruh hasil pabrik yang ada di Belitung didistribusikan melalui pelabuhan yang bekerjasama dengan PT. satelindo Wahana Perkasa²⁴. Kekuasaan yang perleh Ahok menjadi pendorong bagi penguatan capital didaerahnya. Gagasan optimalisasi pelabuhan tidak hanya mampu menempatkan Belitung Timur sebagai daerah pesisir yang mempunyai potensi sangat tinggi dibidang kelautan, namun juga menempatkan posisi capital Ahok secara pribadi sebagai penggagas dan pengembang yang di rintisnya sebelum menjabat sebagai Bupati Belitung timur.

Capaian yang diperoleh Ahok selama menjadi Bupati di Belitung Timur menempatkan dirinya sebagai salah satu tokoh penting yang menerima penghargaan dari Forum demokrasi Kebangsaan yang disematkan langsung oleh ketua MPR RI Prof. Dr. Amien Rais sebagai tokoh reformasi dari kalangan Tionghoa yang berhasil menjadi pemimpin dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Penghargaan lain yang diperoleh adalah penobatan Ahok sebagai 10 tokoh

²²Arip Ripangi, Sisi lain Ahok: Perjalanan hidup, karor dan keluarga, Glosaria Media, Jakarta, 2013, hal.24

²³Ibid, Arip Ripangi, hal. 25

²⁴Arip Ripangi, Sisi lain Ahok: Perjalanan hidup, karor dan keluarga, Glosaria Media, Jakarta, 2013, hal.26

pilihan di majalah Tempo tahun 2006 karena kiprahnya selama menjabat sebagai Bupati Belitung dalam menangani pendidikan dan kesehatan. Pada tahun 2007 Ahok juga mendapatkan penghargaan sebagai tokoh anti korupsi oleh tiga pilar award yang diberikan oleh Sofyan Djalil.

Keinginan berkarir secara politik mendorong basuki Tjahaja Purnama tidak berhenti dalam pemilihan Bupati Belitung Timur. Pada tanggal 11 November 2006, Ahok mengundurkan diri dari jabatan sebagai Bupati Belitung Timur. Walaupun jabatan Bupati belum selesai dijalankan, Ahok memutuskan untuk mengundurkan diri dan mengikuti pemilihan dalam Pilgub Bangka Belitung tahun 2007. Visi yang di gagas pada saat menjabat bupati di Belitung timur belum semua dapat dijalankan. Visi misi yang dijadikan pijakan untuk menjalankan tugasnya tersebut. Namun dalam pemilihan Gubernur pasangan Ahok-Khairul Effendi hanya memperoleh 32,62% suara yang menjadikannya tidak lolos untuk jabatan tersebut.

Gagalnya Ahok dalam pemilihan Gubernur Bangka Belitung tidak menyurutkan keinginannya untuk berkarir di bidang politik dengan menempati posisi sebagai sekjen Partai PIB. Disamping jabatan politik di partai PIB, Ahok tetap mengembangkan bisnis yang ia tekuni. Upaya mengembangkan bisnis dengan memilih Politik sebagai jalur memperoleh kekuasaan mengindikasikan bahwa ada keterkaitan erat antara ekonomi dan politik. Instrument ekonomi menjadi dasar Ahok untuk menetapkan dirinya dalam posisi perebutan kekuasaan baik di tingkat lokal melalui pemilihan Bupati, Gubernur maupun dalam karirnya di partai politik sebagai pengurus cabang partai PIB sampai menjadi sekjen partai PIB. Posisi sekjen partai PIB tidak dijabatnya lama, Ahok mengundurkan diri karena ada konflik internal didalam partai tersebut. Seiring dengan pengundurannya, Ahok mendirikan lembaga *Center for Democracy and Transparency* yang bergerak untuk mewujudkan tokoh-tokoh yang bersih, transparan dan professional untuk menjadi pejabat public dalam pilkada langsung.

Dinamika karir Ahok dalam bidang ekonomi sebagai pengusaha ke politik sebagai Bupati dan juga pengurus partai politik memberi arti penting bagi pergeseran kekuasaan ekonomi yang dimiliki kebanyakan etnis Tionghoa ke arah pergeseran kekuasaan politik, yang justru etnis Tionghoa di era Orde baru tidak memperoleh kesempatan. Kondisi tersebut memberikan pembuktian bahwa di era Demokrasi dan keterbukaan setelah reformasi, kekuatan identitas dan etnisitas yang mengalami alienasi pada masa Orde Baru telah menunjukkan perannya di ranah politik. Posisi jabatan public yang dipegang Ahok menginspirasi bagi etnis Tionghoa untuk terjun di dunia politik. Kondisi social budaya yang lebih cair di era reformasi, dengan dukungan kepemilikan kapital yang sudah mapan akan mempercepat akses kepemilikan kekuasaan politik.

Lembaga *Center for Democracy and Transparency* yang digagas Ahok merupakan lembaga kajian dan riset opini public yang berkaitan dengan pemilihan umum di tingkat nasional dan

khususnya pemilihan di daerah. Dengan mendirikan lembaga tersebut secara tidak langsung Ahok dapat memetakan kebutuhan rakyat akan pemimpin yang diharapkan. Upaya untuk mendorong dan mempromosikan pemimpin yang bersih, transparan dan professional serta menyuarakan partai lokal tidak lain adalah untuk mengkaji kebutuhan rakyat akan demokrasi. kajian tersebut dapat dijadikan dasar yang kuat bagi Ahok untuk membangun pribadinya serta mencanangkan strategi dalam mencapai kekuasaan politik. Hal tersebut nampak pada target yang ingin dicapai pada pemilu tahun 2009 dengan target 10% tokoh yang bersih, diseluruh DPRD kabupaten kota yang ada di Indonesia²⁵.

Pada tahun 2009, melalui pemilu tahun tersebut Ahok maju sebagai calon dari Golkar dan berhasil menempatkan dirinya di komisi II DPR RI periode 2009-2014. Pada tahun 2012 Ahok mengundurkan diri menjadi anggota DPR RI dan mencalonkan diri menjadi wakil gubernur DKI Jakarta mendampingi Joko Widodo dalam pilkada tahun 2012. Karakter vocal, terbuka dan idealis menjadi alat tersendiri bagi Ahok untuk menjalani karir politiknya. Namun konsistensi dalam satu partai ataupun menajalakan jabatan sampai selesai belum dapat dipenuhi. Dorongan kuat dari keinginan karir politik lebih menonjol daripada upaya untuk menjalankan tugas sampai masa jabatan selesai. Pengunduran diri sebagai Bupati dan mencalonkan diri sebagai Gubernur adalah pembuktian bahwa Ahok mempunyai ambisi dan motivasi yang kuat untuk memperebutkan kekuasaan melalui pilkada.

Penguasaan capital juga mengantarkan Ahok untuk ikut dalam pilkada DKI Jakarta. Motivasi melayani rakyat dan mensejahterakan rakyat juga menjadi alasan Ahok untuk menguatkan perannya dalam karir politik. Ahok adalah produk pasca reformasi yang memilih karir politik sebagai jalan mengabdikan untuk rakyat dalam menjawab tantangan ke depan, keberanian Ahok mencalonkan diri sebagai wakil gubernur dalam Pilkada DKI Jakarta telah melalui pertimbangan yang matang. Ada tiga faktor yang mendorong Ahok untuk berkiprah di Jakarta; *Pertama*, adalah rasionalitas publik. Jakarta adalah kota metropolitan dan merupakan melting pot atau tempat pertemuan bermacam ragam suku, agama, ideology dan pemikiran²⁶. Hal tersebut menjadikan Jakarta sebagai kota yang memiliki pluralitas tinggi yang menjadikan warga Jakarta lebih mempunyai rasionalitas tinggi dalam memilih pemimpinnya. *Kedua*, peran kelas menengah di media social yang dipandang mempunyai independensi yang tinggi untuk dapat bersuara mendukung maupun melakukan kritik terhadap gagasan yang disampaikan apabila gagasan tersebut tidak berpihak pada kepentingan public. *Ketiga*, dukungan media massa, Ahok selalu menjadi bahan berita dari berbagai media

²⁵Arip Ripangi, Sisi lain Ahok: Perjalanan hidup, karor dan keluarga, Glosaria Media, Jakarta, 2013, hal.31

²⁶ _____, Kompasiana: Ahok untuk Indonesia, Gramedia, Jakarta, 2014, hal. 6-7

massaa. Sikap yang blak-blakan dan vocal dalam menggapi permasalahan yang ada menjadikan point tersendiri dalam pemberitaan media²⁷.

Dukungan media sosial, media massa dalam karir politik Ahok tidak dapat dipungkiri lagi. Begitu juga adanya "Ahok Center" yang mampu membranding Ahok sebagai politisi yang cemerlang dalam karir politiknya. Konsep "bersih" yang ditawarkan menjadi hal yang sangat menarik bagi pemilih dan menjadi komoditas di panggung politik. Hal tersebut di dukung dengan kondisi masyarakat yang telah merindukan adanya pemberantasan korupsi untuk mewujudkan Indonesia bersih. Keberadaan "Ahok center" memberi penegasan bahwa karir politik Ahok tidak lepas dari kepemilikan capital serta branding yang kuat. Apabila dirunut dari karir politik sejak tahun 2004, seperti yang diberitakan dalam media massa:

Ahok hanya 7 bulan menjadi anggota DPRD Belitung Timur, lalu mundur untuk mengejar jabatan Bupati Belitung timur. Tidak tuntas, hanya 16 bulan, mundur lagi untuk mengejar posisi Gubernur Bangka sampai akhirnya kalah. Lalu mencoba ke Sumatra Utara dan tidak di terima..... setelah itu Ahok pindah partai dan menjadi anggota DPR RI dari Golkar. Tetapi selama 2,5 tahun di DPR RI tidak ada legacy Ahok sampai dia memilih menyinggalkan senayan dan mencalonkan diri dalam Pilgub melalui partai Gerindra²⁸.

Dari data diatas menggambarkan bahwa kepentingan lebih menguasai dari pada kepercayaan rakyat yang memilihnya. Motivasi untuk mensejahterakan rakyat dilihat hanya sebagai alat untuk kepentingan pribadi. Bahkan dalam kekuasaan yang diperoleh justru menjadikan posisi ekonomi Ahok lebih kuat, munculnya perusahaan di kawasan industry pelabuhan yang ada di Belitung, Ahok Center merupakan sedikit pembuktian bahwa kekuasaan yang dibangun justru menguatkan capital yang didapat. Strategi ekonomi dan politik yang dibangun Ahok telah menjadikan Ahok sebagai elit lokal yang mampu bersaing dan berperan lebih banyak dalam membuat kebijakan di wilayah lokal. Disisi lain menempatkan etnis Tionghoa pada posisi yang lebih kuat di wilayah politik. Munculnya Ahok di wilayah politik sebagai elit lokal dari kalangan etnis Tionghoa telah memberikan gambaran riil bahwa etnisitas yang dipandang minoritas justru mampu menjadi mayoritas. Penguasaan capital yang dimiliki memberikan akses tersendiri bagi Ahok untuk menarik simpati masyarakat. Didukung dengan sikap yang peduli semakin membantu karir Ahok di politik lebih cemerlang. Dengan demikian munculnya era reformasi justru semakin mempertegas peluang munculnya kapitalis baru yang berjalan beriringan dengan penguasaan politik.

²⁷ Ibid, Kompasiana, hal 6-7

²⁸ Rakyat merdeka online, dalam Kompasiana: Ahok untuk Indonesia, Gramedia, Jakarta, 2014, hal. 126

Daftar Pustaka:

- Aziz S.R, Abdul, *Hubungan Negara dan Korporasi Dalam Persaingan Usaha Pasar Modern*, 2014, (Ringkasan disertasi tidak dipublikasikan), Jakarta: Departemen Ilmu Politik FISIP UI.
- Dwiyono, Ismantoro, *Ahok dari Kontraversi ke Kontraversi*, Media Presindo, Jakarta, 2014.
- Fukuyama, Francis, *Memperkuat Negara : Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2005.
- Huntington, Samuel P, *Tertib Politik: ditengah Pergeseran Kepentingan Massa*, PT. Raja Grafindo Persada, Tahun 2003.
- Hadiz, Vedi R ,*Dinamika Kekuasaan Ekonomi Politik Indonesia Pasca Soeharto*, LP3S, Jakarta, tahun 2005.
- Hadiz, Vedi R, *The Rise of Capital dalam keniscayaan ekonomi politik*, Prisma, Volume 32 tahun 2013.
- Jayakarta, Ki Ageng, *Duet wong Ndeso Memimpin Jakarta, Relawan Penggerak Jakarta Baru*, Jakarta, 2012.
- Kunio, Yoshihara, *Kapitalisme Semu Asia Tenggara*, Jakarta, LP3ES, Tahun 1987.
- Ripangi, Arip, *Sisi lain Ahok: Perjalanan hidup, karor dan keluarga*, Glosaria Media, Jakarta, 2013.
- Nordholt, Henk Schulte, *Politik Lokal di Indonesia*, Yayasan Obor, Jakarta, 2014.
- Robinson, Richard, *Indonesia: The rise of Capital*, Berne Convention, Autralia, 1986.
- Randan Bua, Pieter, *The Ahok Way: Hidup Adalah Kebenaran, Mati Adalah keuntungan*, Anugerah Indonesia, Bandung, 2013.
- Suryadinata, Leo, *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa 1900-2002*, LP3ES, Jakarta, Tahun 2005.
- Setiono, Benny G, *Tiongkok Dalam Pusaran Politik*, Media Pustaka, Jakarta, 2008.
- Tanter, Richard ,*Politik kelas Menengah Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1996
- Wassertstrom, Jeffrey N, *Tiongkok di abad 21*, Gramedia, Jakarta, 2012.
- _____, *Kompasiana: Ahok untuk Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2014.
- _____, *Index Prestasi*, No. 1, November 2012